

Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Religiusitas untuk Mewujudkan Ekonomi *Wasathiyah* yang Berkeadaban

Muhammad Djakfar

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maliki Malang

Email: mdjakfar@yahoo.co.id

Abstrak

Sistem ekonomi yang berlaku di dunia ini dapat dipetakan ke dalam dua kategori. Pertama, kelompok sekuler yang memisahkan urusan ekonomi dengan nilai-nilai religiusitas yang transenden sebagaimana paham kapitalisme dan sosialisme. Sumber pokok ajarannya adalah sains yang merupakan produk akal manusia. Yang kedua, kelompok spiritual yang menyatakan masalah ekonomi tidak boleh lepas dari norma spiritual yang bersumber dari ajaran wahyu, yakni Alquran dan Sunnah. Secara realitas, dalam implementasinya, sistem sekuler mengandung banyak kelemahan sebagaimana yang banyak dikemukakan para pakar. Seperti munculnya kesenjangan dan rasa ketidakadilan yang merugikan masyarakat. Agar kondisi seperti ini tidak berkelanjutan, maka perlu dicarikan solusinya. Secara normatif, bagaimanapun aktivitas ekonomi tidak boleh lepas dari nilai-nilai spiritual yang transenden yang bersumber pada ajaran agama. Untuk itu, para pakar ekonomi Islam sepakat bahwa aspek ketuhanan (*uluhiyyah-rububiyyah-tawhid*) merupakan sumber nilai yang paling asasi yang dapat membimbing manusia sesuai ketentuan-Nya. Islam mengajarkan dalam aktivitas ekonomi terkandung dimensi duniawi dan ukhrawi, dimensi materiil dan spiritual (sebagai ibadah, Adz-Dzaariyaat, 51:56). Selain perlu saling melindungi antara produsen dengan konsumen, antara majikan dengan buruh. Inilah gambaran nilai-nilai dalam Islam yang perlu menjadi poros kekuatan ekonomi *wasathiyah* (Al-Qashash, 28:77; Al-Ma'arij, 70:24-25) yang perlu direvitalisasi dan diaplikasikan dalam aktivitas ekonomi agar rasa keadilan berekonomi bisa terwujud di era global ini.

Katakunci: revitalisasi dan aktualisasi, nilai religiusitas, ekonomi *wasathiyah*, berkeadaban

1. Pendahuluan: *Academic Problem*

Secara naluri, bagaimanapun manusia pasti mendambakan kebahagiaan, ketenteraman, kemakmuran, kenyamanan, ketenangan, kenikmatan, keadilan dan lain sebagainya, yang kesemuanya bersifat universal yang dikenal dengan kemaslahatan (*mashlahah*). Dalam hal ini, Islam sebagai salah satu agama langit dengan ajaran wahyu yang diturunkan melalui Rasul-Nya, Muhammad saw, menuntun pemeluknya untuk meraih

kesejahteraan lahir dan batin (Chapra, 2000, Djakfar, 2015)), selamat tidak saja di dunia, bahkan juga di akhirat kelak.

Untuk dapat meraih kesejahteraan itu, manusia bagaimanapun harus melakukan usaha atau dengan jalan bekerja, antara lain masuk ke dalam kancah bisnis (kewirausahaan). Sebagaimana yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah saw (Afzalurrahman, 1982; Antonio, 2007; Alma, 2003). Dalam realitas, praktik kewirausahaan dalam setiap kawasan sangat tergantung pada dasar filosofi sistem ekonomi yang dibangun. Artinya ada hubungan garis lurus (linieritas) antara praktik kewirausahaan di lapangan dengan paradigma sistem ekonomi yang dianut, apakah kapitalisme atau sosialisme. Atau dengan kata lain, bagaimanapun praktik sektor riil di sebuah kawasan selalu diwarnai oleh *worldview* sistem ekonomi yang menjadi pandangan hidupnya (Kahf, 1979).

Dalam kenyataan secara historis, tidak sedikit sistem ekonomi yang dianut oleh setiap negara di dunia, baik yang sudah redup atau mati maupun yang masih berkembang sampai abad modern dewasa ini. Secara garis besar sistem ekonomi dapat dipetakan ke dalam dua kategori, yakni yang bernuansakan agama (spiritualitas) dan berdasarkan sains (akal-logika). Kategori pertama adalah sistem ekonomi yang dipandu nilai-nilai agama yang transenden yang bersumber dari ajaran wahyu yang di dalam Islam terpatrit di dalam kandungan al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw (Qardhawi, 1995; Mannan, 1995, Naqvi, 1994, Chapra, 2000). Ke dalam sistem ini otoritas Tuhan masuk ke dalamnya untuk memberi petunjuk ke jalan yang benar (Djakfar, 2015).

Sebaliknya untuk kategori yang kedua yang menjadi sumber kekuatannya adalah sains yang berasal dari hasil renungan dan spekulasi akal manusia yang penuh keterbatasan. Dan dengan keterbatasan ini manusia sekuler mencoba untuk membangun sebuah sistem ekonomi yang menjauhkannya dari nilai-nilai *ilahiyah-rabbaniyah*. Mereka berpandangan bahwa urusan ekonomi adalah semata ranah duniawi yang materialistik, sehingga tidak perlu diintervensi oleh nilai-nilai ukhrawi yang spiritualistik.

Oleh karena itu, menurut mereka, perlu ada garis demarkasi agar keduanya berjalan menurut habitatnya masing-masing. Padahal, keberadaan manusia selaku pelaku ekonomi merupakan perpaduan antara unsur materi dengan spiritual (Abu Saud, 1984). Bahkan akhir-akhir ini telah terjadi fenomena pergeseran paradigma dari yang rasional, beralih ke emosional, dan saat ini sudah mulai ke proses spiritualisasi, antara lain sebagaimana yang terjadi pada dunia *marketing* yang sangat urgen dalam pengembangan usaha (Kartajaya, 2006).

Di antara dampak yang dirasakan dari sistem yang kedua ini muncullah ketidakadilan dalam segala aktivitas ekonomi, terjadilah eksploitasi siapa yang kuat memangsa yang lemah dan menjadikan materi sebagai ukuran nilai keberhasilan dalam hidup (Abu Saud, 1984). Lebih jauh, subjek pelaku ekonomi diperbudak oleh materi (Abu Saud, 1984) dan lebih mementingkan usahanya sendiri (*corporate*) yang tidak jarang seringkali mengorbankan nilai-nilai kebajikan dan kemanusiaan yang sejatinya menjadi energi positif untuk menciptakan sebuah sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkeadaban (Siddiqi, 1979; Djakfar, 2015). Berkeseimbangan antara kepentingan diri dan orang lain, antara kepentingan korporat dan *stakeholders*, antara kepentingan hak dan kewajiban para pihak, dan lain sebagainya.

Namun demikian dalam kenyataan justru menunjukkan hal yang sebaliknya, karena atmosfer ketidakadilan dengan berbagai modusnya terus berkelanjutan di era global ini (Chapra, 2000, 342). Pemicunya yang paling mendasar adalah karena sistem ekonomi yang dibangun kering dari nilai-nilai transenden. Atau, menjauhkan nilai-nilai sakral kolektif yang dimiliki oleh agama (Chapra, 2000:342). Menurut sistem ini ekonomi adalah ekonomi, atau bisnis adalah bisnis sehingga tidak perlu sentuhan nilai-nilai religiusitas yang abstrak. Urusan duniawi tidak terkait sama sekali dengan urusan akhirat yang dianggap sangat bersifat pribadi (*private*)(Djakfar, 2012). Karena itu menurut Chapra, sistem ekonomi sekuler tidak dapat dijadikan model karena tidak dapat memberikan kebahagiaan batin yang menuntut kepuasan spiritual dan materiil manusia secara universal (Chapra, 2000:345).

Inilah sejatinya inti pemicu substansial dan paling mendasar lahirnya ketidakadilan global yang ditandai dengan sifat egoistis (*ananiyah*) dan memaknai hidup hanyalah sebatas untuk kepentingan duniawi semata dengan mengejar harta (materi) yang sebanyak-banyaknya. Inilah kiranya kelemahan mendasar sistem ekonomi sekuler yang dalam praktiknya teralienasi dari sifat inklusi dan moderasi.

Solusinya antara lain perlu adanya intervensi atau sentuhan nilai-nilai religiusitas dalam dunia ekonomi dan bisnis. Perlu ada kesadaran dari para pemangku kebijakan dan para pelaku ekonomi bahwa nilai-nilai religiusitas adalah merupakan modal pokok dan asasi (*religiosity capital*) yang harus mengawal setiap aktivitas ekonomi sehari-hari sebagai prakondisi untuk membangun sistem ekonomi solutif yang berkeadaban di era persaingan global sepanjang zaman. Tawaran solusi dimaksud antara lain dapat digali dari konsep-konsep sebagaimana yang diajarkan dalam Islam (Kahf, 1979:v).

2. Sistem Sekuler: Masalah Makna dan Tujuan Hidup

Perlu disadari bahwa sistem ekonomi yang selama ini banyak dianut di berbagai belahan dunia adalah kapitalis, sosialis dan negara kesejahteraan (Chapra, 2000:341). Dalam perjalanan sejarahnya, nampaknya kedua sistem terakhir ini mulai kurang atau tidak ada lagi dominasinya, dibanding sistem yang pertama yang tetap eksis dan terus menjadi madzhab perekonomian dunia. Namun demikian, menurut Chapra (2000), ketiga sistem itu sejatinya telah gagal dalam mensejahterakan kehidupan manusia. Kemunduran atau kegagalan itu sejalan pula dengan pandangan Sya'rawi (1991:10) sehingga perlu dicarikan sistem alternatif, dalam hal ini Islam, yang pada dasarnya sama-sama mengakui keberadaan hak individu maupun kelompok (kolektif).

Perlu dipahami bahwasanya ketiga sistem di atas adalah sistem yang tidak tersentuh sama sekali nilai-nilai spiritual apa pun, terlebih lagi yang bersumber dari doktrin agama. Atau dengan kata lain, secara teoritik maupun praksis, ketiga sistem tersebut seakan-akan menciptakan garis demarkasi yang memisahkan secara eksplisit masalah ekonomi yang *profane* dengan masalah spiritual yang transendental. Menurut

sistem ini masalah ekonomi dan spiritual tidak mungkin bersinggungan atau dipertemukan karena merupakan dua entitas yang berbeda.

Lepasnya nilai spiritualitas dari masalah ekonomi pada dasarnya tidak lepas dari bagaimana cara memaknai hidup yang di dalam Islam adalah untuk mengabdikan kepada Allah guna memperoleh ridla-Nya (Adz-Dzaariyaat, 51:56; Madjid, 2000:575; Nasution, 1996:181). Tujuan hidup manusia sejatinya adalah meraih kesempurnaan (*al-kamal al-mumkin*) (Nasution, 1996:181). Kesempurnaan di sini yang dimaksudkan adalah kesempurnaan jiwa yang perlu sentuhan nilai-nilai spiritualitas yang sejatinya bersumber dari ajaran agama. Sehingga dengan demikian jika sistem ekonomi yang bersinggungan dengan nilai-nilai agama tidak akan kering dari nilai-nilai spiritualitas dan bahkan akan selalu akan mendapat bimbingan dari Tuhan (Kahf, 1979; Qardhawi, 1995; Chapra, 2000, Naqvi, 1994).

Inilah sejatinya inti ajaran sekuler yang menjadi landasan filosofi dalam sebuah sistem ekonomi yang membedakan dari sistem ekonomi yang bersumber dari ajaran religiusitas sebagaimana sistem ekonomi Islam yang bersumber dari ajaran wahyu. Paradigma berpikir para penganut sekuler hanyalah bertumpu pada kepentingan materialistik semata. Sebagai dampaknya, para penganutnya merasa bebas mencari harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya, seakan tanpa batas. Kekayaan hanyalah diukur dengan uang sehingga yang menggerakkan dunia adalah kekayaan materiil. Laba yang dikejar dalam bisnis adalah laba yang berupa materi (Zohar dan Marshall, 2004:58).

Akibat yang lebih jauh dari sistem sekuler itu tidak jarang telah mendorong adanya sikap egoistis, kerusakan lingkungan, pemanasan global, eksploitasi terhadap pihak yang lemah oleh pihak yang kuat, membiakkan penderitaan dan kemarahan di berbagai kawasan (Zohar dan Marshall, 2004:51). Karena itu, ketidakpuasan terhadap kapitalisme dan kegagalan komunisme (sosialisme) menurut Zohar dan Marshall telah menggerakkan sejumlah pemikir untuk mencari jalan ketiga sebagai paradigma baru yang bernuansa spiritualitas (Zohar dan Marshall, 2004:52-53).

Bagi kalangan Muslim, yang dimaksud dengan istilah “jalan ketiga” tersebut adalah jalan alternatif sebagai solusi atas kegagalan sistem sekuler (Kahf, 1979:181). Jalan alternatif itulah yang disebut dengan sistem ekonomi Islam yang bersumber pokok dari ajaran wahyu. Sekalipun semua agama secara universal berbicara masalah ekonomi, namun bukanlah tidak mungkin dalam masing-masing agama tidaklah sama dalam implementasinya. Dalam hal ini sangat tergantung pada landasan dan tujuannya, selain aksioma-aksioma dan prinsip-prinsip yang dipedomaninya (Kahf, 1979:4-6).

Sebagai konsekuensinya, sistem ekonomi Islam seharusnya diformulasikan berdasarkan pandangan Islam tentang kehidupan. Dalam hal ini Islam mengajarkan bahwa melaksanakan aktivitas di bidang ekonomi merupakan sebuah ekspresi tanggung jawab kekhalifahan di muka bumi (Qardhawi, 1995). Atau merupakan bagian dari ibadah kepada Tuhan sehingga dengan demikian dalam pelaksanaannya perlu mengikuti ketentuan syariah (Adz-Dzaariyaat, 51:56)

3. Agama: Sebagai Petunjuk dan Sumber Nilai

Berbicara tentang spiritualitas tentu saja tidak dapat dipisahkan dari faktor agama atau keyakinan teologis tertentu, kendati secara universal bisa jadi spiritual itu bersumber dari selain agama (Zohar dan Marshall, 2005:62). Dalam kaitan ini, Zohar dan Marshall secara tegas menyatakan bahwa saya tidak berpikir bahwa korporat dapat lebih spiritual dengan mendirikan kuil di ruang tamu, atau menghimbau para karyawan mereka untuk berdoa. Kendati diakui bahwa spiritualitas itu dipandang sebagai energi yang memberinya kehidupan yang lebih berkualitas dalam satu kerangka makna dan tujuan yang lebih luas (Zohar dan Marshall, 2005:62-63).

Dalam Islam diyakini bahwa agama adalah merupakan sumber spiritualitas yang paling mendasar yang bersumber dari ajaran wahyu. Reville mendefinisikan agama sebagai penentuan kehidupan manusia sesuai dengan ikatan antara jiwa manusia dengan yang ghaib. Sedangkan Michel Mayer memaknai agama sebagai seperangkat kepercayaan dan aturan untuk membimbing manusia dalam tindakannya terhadap Tuhan, orang lain dan diri sendiri. (Kahf, 1979)

Bertolak dari definisi di atas dapat dipahami bahwa agama secara universal merupakan media hubungan antara manusia dengan pencipta-Nya yang berfungsi untuk membimbing dan sumber nilai. Ajaran ini tentu saja sesuai dengan ajaran Islam yang secara tegas diyakini bahwa agama itu merupakan petunjuk (*hudan*), sekaligus sebagai sumber nilai yang akan memandu kehidupan manusia agar mendapat *falah*, tidak saja di dunia namun juga di akhirat kelak (Siddiqi, 1979:3).

Dikatakan bahwa Islam adalah merupakan sistem terpadu ('Abdurrahim, 2002). Islam memadukan antara spiritual dengan material, antara dunia dan akhirat, antara kepentingan individu dengan kepentingan kelompok (sosial) dan sebagainya. Sebab itu, Islam memandang dalam aktivitas ekonomi tidak semata untuk memenuhi kebutuhan ragawi semata, seperti sandang, pangan dan papan. Namun lebih dari itu sekaligus bernuansa ibadah kepada Tuhan.

Lebih jauh juga dapat dipahami bahwa menurut Qardhawi (1995) Islam itu lebih integral dari sekadar agama, karena di dalam ajarannya terpadu masalah agama (*ukhrawi*) dan dunia, ibadah dan muamalah, akidah dan syariah. Selain masalah kebudayaan dan peradaban, agama dan negara, dan lain sebagainya. Itulah gambaran betapa luas cakupan ajaran Islam sebagai agama terakhir bagi umat manusia sampai akhir zaman. Dan itu pula inti ajaran syariat Islam sebagai salah satu agama langit (*wahyu*) yang meliputi akidah, ibadah dan akhlak (Qardhawi, 1995)

Karena itu pendapat lain juga ada yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang multi komplit, multi faktual dan multi dimensi dalam memenuhi kehidupan makhluk ciptaan-Nya (Abu Saud, 1984). Kemultidimensian dalam Islam meliputi seperangkat tatanan hukum, peraturan atau peraturan perundangan yang sedemikian komprehensif, tanpa kecuali juga tentang tata karma atau nilai-nilai etika yang perlu dijadikan nilai dalam segala aspek kehidupan. Tanpa kecuali di dalam masalah ekonomi yang menjadi ruh kekuatannya.

Disadari bahwa agama apa pun, pasti berfungsi sebagai petunjuk dan sumber nilai bagi pemeluknya. Ini dimaksudkan agar mereka tidak sesat jalan dalam kehidupan dengan berpegang teguh pada norma-norma yang diajarkan. Baik dalam hubungannya

dengan Tuhan selaku Dzat Pencipta yang wajib disembah, maupun dengan sesama manusia dan lingkungan di mana manusia hidup bermasyarakat.

Dalam Islam, petunjuk dalam kaitan dengan masalah ekonomi itu dimaksudkan agar dalam melakukan bisnis (muamalah) misalnya, seorang Muslim wajib menghindari riba dan menghindari kecurangan yang berpotensi merugikan orang lain. Dalam utang-piutang dan jual-beli misalnya, perlu dihindari adanya praktik bunga (*ribawi*) dan mengurangi timbangan yang jelas dilarang.

Demikian pula dalam masalah produksi, produsen dilarang mengganggu ekosistem karena penggunaan bahan baku yang over kapasitas, atau membuang limbah yang berpotensi merusak lingkungan. Atau, di sisi lain, dalam kapasitasnya sebagai konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup, seseorang harus menghindari sikap berlebihan dan pemborosan (*tabdzir/isyrof*) (Mannan, 1995). Demikian pula dalam kaitan dengan masalah hubungan industrial, bagaimanapun pengusaha wajib memperlakukan karyawan (buruh) secara manusiawi. Hak-hak pekerja perlu diberikan secara adil, patut dan layak setelah mereka menunaikan kewajibannya secara proporsional.

Alhasil, dalam melakukan muamalah yang berkaitan dengan seluruh aktivitas ekonomi, Islam mengajarkan agar dalam praktiknya ada dominasi hukum yang menentukan garis demarkasi antara wilayah yang boleh atau dilarang untuk dikerjakan. Selain juga dominasi etis yang mengajarkan, manakah wilayah yang baik untuk dikerjakan, atau justru sebaliknya wilayah mana yang tidak baik jika dilanggar.

Itulah di antara contoh ilustrasi masalah norma dalam ranah ekonomi yang dikenal dengan istilah muamalah yang bersumber dari ajaran Islam, yakni al-Qur'an dan Sunnah. Sejatinya, kedua norma itu, baik hukum maupun etik berfungsi untuk memberi arah yang jelas dikehendaki oleh syariat Islam.

Tujuan akhirnya (*goals-ending*) adalah agar tidak terjadi kesesatan dan eksploitasi dalam segala aktivitas ekonomi yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain juga agar terwujud keseimbangan (*balancing-tawazun*) antarpihak yang bermuamalah. Adanya faktor keseimbangan dalam praktik bisnis apa pun, pada

hakikatnya di dalamnya telah ada rasa keadilan yang akan membuat nyaman antarpihak yang berkepentingan. Itulah Islam sebagai agama keadilan di mana siapa pun yang berhak perlu menerima haknya (Muthahhari, 1992:29).

Itulah sejatinya yang dimaksud agama, dalam hal ini Islam, sebagai petunjuk dan sumber nilai yang wajib dipatuhi oleh seluruh umatnya. Dengan prinsip, bahwa siapa pun yang mengikuti arah petunjuk, maka ia akan selamat, tidak saja di dunia namun juga di akhirat. Demikian pula bagi siapa pun yang mengikuti ketentuan norma yang diberlakukan, karena di dalam ajaran itu ada nilai-nilai spiritualistik yang berkaitan dengan masalah kehidupan kelak setelah mati.

4. Ekonomi *Wasathiyah*: Revitalisasi Konsep

Sebagaimana telah digambarkan sebelum ini, Islam adalah agama langit yang bersumber dari ajaran wahyu, yakni al-Qur'an dan Sunnah dengan tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kemaslahatan atau keselamatan di dunia dan di akhirat ('Iwd, 1401H:14-15). Untuk mencapai kebahagiaan itu, Islam secara tegas dan jelas memberikan rambu-rambu, tanpa kecuali dalam kaitan dengan aktivitas ekonomi guna memenuhi tuntutan hidup sehari-hari.

Sebagai ajaran wahyu, Islam menegaskan bahwa ekonomi tidak lepas dari ketentuan *Ilahiyah-Rububiyah* sebagaimana yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi Islam yang pada akhirnya menjadi karakteristik yang spesifik yang membedakan dari sistem ekonomi sekuler secara mendasar. Antara lain sebagaimana yang dikemukakan Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa karakteristik ekonomi Islam meliputi aspek *ilahiyyah/rububiyah* (ketuhanan-tauhid), *insaniyah* (humanism-kemanusiaan), *akhlaqiyah* (moral-etika), dan *wasathiyah* (pertengahan-berkeseimbangan) (Qardhawi, 1995).

Tidak sedemikian Syed Nawab Haider Naqvi yang mengedepankan ciri ekonomi Islam meliputi empat aspek, yakni *tawhid* (pengesaan Tuhan), *al-'adl wa al-ihsan* (keseimbangan-kebaikan), *ikhtiyar* (kebebasan memilih), dan *fardh* (tanggungjawab) (Naqvi, 1994). Sedangkan Umer Chapra mengedepankan paling tidak ada tiga ciri

ekonomi yang berbasis syariah ini, yakni *tawhid* (keesaan Tuhan), *khilafah* (perwakilan), dan *'adalah* (keadilan) (Chapra, 1995/2000-Tantangan?).

Pendapat lain menyatakan bahwa ekonomi Islam meliputi lima komponen, yakni *tawhid* (keesaan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintahan), dan *ma'ad* (return) (Karim, 2002:35-41; Djakfar, 2014:198-199). Lima komponen ini nampaknya mengadopsi dari lima prinsip keadilan Ilahi sebagaimana yang dikemukakan Murtadha Muthahhari dalam sebuah karyanya yang berjudul *Al-'Adl fi al-Islam*, yakni *tawhid*, *al-'adl*, *nubuwwah*, *imamah*, dan *ma'ad* ((Muthahhari, 1992:52).

Dari sekian banyak pendapat pakar di atas, yang perlu dicatat bahwa ciri utama ekonomi Islam adalah berbasis ketuhanan (*tawhid*) atau berlandaskan pada *Ilahiyyah-Rububiyah*. Ini menunjukkan bahwa aspek ketuhanan merupakan salah satu aspek yang sangat vital dan strategis sekali dalam upaya mengembangkan ekonomi yang berbasiskan agama yang sumber pokok dari ajaran wahyu. Aspek tauhid inilah sejatinya yang merupakan inti dari ajaran Islam yang seharusnya menjadi tata nilai yang dijiwai oleh kesadaran bahwa hidup ini berasal dari Tuhan dan menuju kepada Tuhan (Madjid, 2000:1).

Sebab itu aspek *Ilahiyyah-Rububiyah* (*divine*) dimaksudkan dalam melakukan aktivitas ekonomi dalam bentuk apa pun manusia tidak boleh lepas dari ketentuan tata nilai Tuhan sebagai Pemilik mutlak (Djakfar, 2015). Dalam hal ini posisi dan kapasitas manusia sebagai khalifah hanyalah sebatas penerima amanah untuk mengelola bumi beserta isinya untuk kemaslahatan umat manusia keseluruhan (Qardhawi, 1995; Madjid, 2000:1). Aspek *ilahiyah-rububiyah* merupakan kausa prima atas aspek karakter yang lain (Qardhawi, 1995). Dengan demikian konsistensi terhadap aspek *divine* ini akan sangat menentukan terhadap aspek-aspek yang lain (turunannya).

Artinya, dalam aktualisasinya, komitmen terhadap ketentuan Tuhan akan sangat mewarnai bagaimana komitmen seseorang terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam melakukan bisnis dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan yang sejatinya harus dijunjung tinggi. Ia tidak akan menipu manusia dalam bisnis karena bagaimanapun perbuatan menipu yang berpotensi merugikan orang lain adalah bagian dari larangan

Tuhan yang wajib dihindari, sekaligus merupakan cermin ketidakadilan yang sangat mendasar. Karena itu bagi orang Muslim, demi kesejahteraan dan keselamatan (*salam, salamah*) di dunia dan akhirat, mereka harus bersikap pasrah kepada Tuhan (*islam*-dalam makna generiknya), dan berbuat baik kepada sesama manusia (Madjid, 2000:1-2). Tentu saja berbuat baik di sini dimaksudkan dalam arti umum, termasuk di dalamnya adalah berbuat adil terhadap sesama dalam segala aspek kehidupan.

Bukankah Islam itu sendiri sangat menekankan rasa keadilan, menyeimbangkan hak dan kewajiban antarsesama, tanpa kecuali dalam dunia bisnis. Menyeimbangkan antara kepentingan korporat dengan kepentingan konsumen, menyeimbangkan antara kepentingan duniawi yang *profane* dengan kepentingan ukhrawi yang transenden, menyeimbangkan antara kepentingan lahir dan batin dan seterusnya.

Watak keseimbangan itulah yang dimaksud Qardhawi dengan istilah *wasathiyah* yang mengindikasikan bahwa sistem ekonomi Islam itu bersifat inklusif (moderat), jauh dari dua kutub ekstrem yang terlalu banyak memberi kebebasan hampir tanpa batas kepada individu atau swasta sebagaimana sistem kapitalisme. Sebaliknya, terlalu banyak memberi porsi berlebih pada peran negara dalam sistem sosialisme. Islam justru memberi kebebasan kepada setiap orang (individu) untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, namun di dalam harta itu sebagian ada hak orang lain yang justru wajib ditunaikan (Al-Ma'arij, 70:24-25; At-Taubah, 9:60; bandingkan dengan Syaikhun, 2012:2-6).

Islam menekankan kepedulian kepada orang lain antara lain melalui ajaran filantropi yang mewajibkan setiap Muslim yang mampu untuk menunaikan zakat. Selain juga disunahkan banyak memberikan infak, sedekah, wakaf, dan hibah, Bahkan bila perlu memberi wasiat sesuai ketentuan yang disyariatkan. Karena itu, dalam kaitan ini tepat sekali ilustrasi Dawam Rahardjo, yang menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam ibarat mendayung di antara dua karang, yakni karang kapitalisme, dan yang lain karang sosialisme (Djakfar, 2014:199).

Itulah konsep *wasathiyah* yang menjadi watak dasar ekonomi Islam yang justru perlu direvitalisasi agar rasa keadilan dalam bidang ekonomi bisa terwujud di era global

ini. Yakni revitalisasi konsep keadilan *uluhiyyah-rabbaniyyah* yang diharapkan menjadi antitesis atas sistem sekuler yang tidak jarang jauh dari nilai-nilai keadilan yang berpotensi memarginalkan banyak orang.

5. Etos Kerja dalam Islam: Spirit dan Aktualisasi

Kiranya semua agama mempunyai titik temu yang sama, yakni sama-sama mengindroktinasi dan memotivasi agar umatnya memiliki etos kerja yang tinggi, seperti Kong Hucu, Kristen, Budha, Hindhu, Shinto, dan Islam. Secara faktual dapat dibuktikan, Cina yang Kong Hucu akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sedemikian signifikan di tengah persaingan global. Negara ini yang dulu dikenal dengan sebutan negara tirai bambu hampir dipastikan maju karena ajaran etika Kong Hucu, sebagaimana Taiwan, Hongkong, dan Singapura (Madjid, 2000:410).

Demikian pula negara-negara ekonomi maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Kawasan Eropa yang kapitalis menurut tesis Max Weber, maju karena tidak lepas dari pengaruh ajaran Protestan, terutama sekte Calvinis puritan yang mereka anut (Djakfar, 2009:34). Demikian pula Jepang yang menganut teologi religi Tokugawa dan Budhisme Zen, muncul sebagai salah satu raksasa teknologi dan ekonomi dunia, mampu menyaingi beberapa negara maju di dunia (Djakfar, 2009:41).

Demikian pula Islam, secara teoritis-normatif, tidak sedikit ayat-ayat yang mendorong agar umat Islam beretos kerja yang tinggi, dalam arti bekerja mencari nafkah. Di dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 360 ayat tentang amal, dan 109 yang membicarakan tentang *fi'il*, yakni dua kata yang sama-sama bermakna kerja dan aksi (Ahmad, 1995:10; Djakfar, 2009:43).

Bahkan secara realitas, telah dipraktikkan langsung oleh Rasulullah saw yang bergelut langsung dalam dunia wirausaha selama kurang lebih 25 tahun. Melebihi durasi *nubuawahnya* yang hanya kurang lebih 23 tahun (Djakfar, 2012, Antonio, 2007) Karena itu Rasulullah saw mewajibkan kepada setiap Muslim agar bekerja keras dengan memperoleh ridla Allah dan Rasul-Nya (Madjid, 2000:412).

Pandangan Islam tentang etos kerja dapat ditangkap dari makna sabda Nabi yang sangat populer bahwa nilai setiap bentuk kerja itu tergantung kepada niat-niat pelakunya (Madjid, 2000:412). Uswah Rasulullah saw ini juga diikuti oleh para sahabat beliau, seperti Abhdurrahman bin 'Auf ra dan Utsman bin 'Affan ra. Bahkan Siti Khadijah ra sendiri yang akhirnya menjadi isteri Rasulullah saw, dikenal sebagai konglomerat Makkah pada zamannya.

Bertolak dari ajaran dan kenyataan historis di atas sangatlah naïf, bahkan kontraproduktif dengan tesis Max Weber, jika Islam dipersepsikan sebagai agama prajurit dan asketis karena distigmakan sebagai agama anti kemapanan dan benci keduniawian (Weber, 2001; Abdullah, 1979): Hasan, 2009). Tesis ini tentu sangatlah prematur sekali dan kurang beralasan, karena secara normatif dan paraksis jelas bertolak belakang dengan spirit ajaran Islam yang sangat menekankan terbangunnya etos kerja yang tinggi di kalangan pemeluknya. Tanpa kecuali dalam urusan bisnis.

Memang, secara realitas, selama ini berbagai negara Islam maupun negeri Muslim mana pun belum mampu menjadi pemuka ekonomi di pentas global sebagaimana negara-negara maju di dunia. Kenyataan ini lebih karena faktor manusia sebagai subjek pelakunya (Madjid, 2000:412). Nampaknya, sebagian besar mereka belum mampu merevitalisasikan, terlebih lagi mengaktualisasikan ajaran wahyu ke dunia ekonomi secara *kaffah*. Kendati sejatinya umat Islam selayaknya menjadi umat terdepan dalam mengawal pengembangan ekonomi yang berkeadaban yang bernafaskan ajaran Islam.

Sebab itu, di tengah maraknya praktik ekonomi kapitalistik yang *ribawi*, yang tidak jarang telah melahirkan kesenjangan dan ketidakadilan di kalangan umat manusia, sejatinya spirit ajaran Islam itu perlu menjadi solusi dengan mengaktualisasikannya ke dalam berbagai sektor berbagai riil guna memenuhi kebutuhan masyarakat banyak secara menyeluruh tanpa kecuali.

Perlu dipahami, bahwa secara normatif, spirit kerja dalam Islam tidak saja sebatas mengejar kepentingan keduniawian yang bersifat nisbi, pragmatis, dan temporer, namun yang paling krusial adalah sekaligus juga untuk kepentingan ukhrawi yang

transenden, kekal dan abadi. Artinya, dalam kaitan dengan etos kerja dalam wirausaha misalnya, seorang pelaku tidaklah cukup hanya mengejar keuntungan (*ribhun-profit*) untuk kepentingan jangka pendek yang temporer dan terbatas (*limited*), namun ditekankan pula untuk kepentingan ibadah kepada sang Pemilik Mutak, yakni Tuhan Yang Maha Esa, demi kehidupan akhirat yang tanpa batas (*unlimited*).

Inilah sejatinya salah satu gambaran yang lebih konkrit perlu adanya faktor keseimbangan dalam perilaku ekonomi yang diajarkan dalam Islam sebagaimana telah digambarkan di atas.

6. Catatan Akhir

Mengakhiri kajian ini dapat dipahami bahwasanya nilai-nilai religiusitas harus hadir dalam ekonomi yang sejatinya terefleksi dalam segala bentuk usaha bisnis dalam sektor riil. Signifikansinya yang paling krusial adalah memberi isi pada konsep ekonomi yang selama ini didominasi oleh pandangan sekuler. Selain juga perlu menjadi panduan (*guideline- blueprint*) bagi para subjek pelaku dalam segala lini.

Merubah sistem yang selama ini telah menjadi *mindset* masyarakat global yang telah lama dipahami dan dipraktikkan, tidaklah mudah. Sebagai dampaknya, fenomena yang nampak, kemiskinan terus berlanjut dan sulit diberantas di berbagai kawasan, tanpa kecuali di negara Indonesia sendiri.

Hal itu mengindikasikan bahwasanya sistem sekuler pada hakikatnya telah memberi ruang terjadinya praktik dehumanisasi yang tidak jarang telah mengorbankan nilai-nilai kebajikan. Sebagai akibat lebih jauh yang kian terasa adalah terus terjadinya eksploitasi terhadap alam yang mengganggu stabilitas ekosistem di berbagai belahan dunia. Tanpa kecuali terhadap berbagai bangsa oleh negara kuat dengan dalih ingin membantu, kendati hal itu pada hakikatnya adalah adegan filantropi semu belaka. Lahirnya komunitas seperti AFTA, WTO, MEA, dan lain sebagainya nampaknya hanyalah sebatas instrumen atau modus untuk melanggengkan dominasi ekonomi negara-negara kuat terhadap negara-negara berkembang yang terjebak di dalamnya.

Jika dilihat dari perspektif Islam, itulah sejatinya akar permasalahan yang paling mendasar yang menyebabkan lahirnya kesenjangan atau ketidakadilan dan semakin sulit terwujudnya tatanan ekonomi dunia yang berkeadaban. Agar tidak terus berkelanjutan, di sinilah arti penting perlu dicari terapi mujarab sebagai bagian dari solusinya, yakni menjadikan nilai-nilai religiusitas sebagai spirit dan pemandunya, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.

Dengan kata lain, untuk mewujudkan tatanan ekonomi global yang berkeadilan, Islam menawarkan konsep, bagaimanapun ekonomi tidak boleh teralienasi dari nilai *uluhiyah-rabbaniyah* yang akan memandu agar segala aktivitas ekonomi harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, dan nilai-nilai kebajikan. Sebagai prasyarat terciptanya rasa keadilan dan keseimbangan antara kepentingan diri dan orang lain, kepentingan produsen dan konsumen, kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan material dan spiritual dalam bingkai bimbingan Tuhan selaku Pemilik mutlak.

Itulah konsep ajaran ekonomi *wasathiyah* yang sarat dengan nilai-nilai spiritualistik yang perlu direvitalisasi dalam segala kebijakan, untuk kemudian diaplikasikan dalam ranah aktivitas bisnis sehari-hari agar moderasi dan inklusi di dunia ekonomi bisa menjadi kenyataan dalam konteks apa pun, kapan pun, dan di mana pun saja.

Indonesia sebagai satu-satunya negeri Muslim (sekitar 88%) dengan jumlah populasi nomor empat terbesar di dunia (sekitar 260 juta) setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat, sejatinya perlu menjadi negara terdepan dalam memperakarsai tegaknya sistem ekonomi *wasathiyah* di tingkat global, yakni sebuah sistem ekonomi yang berkeadaban yang menekankan sikap inklusi dan moderasi yang berwawasan nilai-nilai religiusitas. Hal ini baru akan terwujud jika didukung oleh kemauan dan tekad bersama seluruh pihak terkait dalam tataran global di atas prinsip kebersamaan dan saling menguntungkan.

Daftar Pustaka

Abdullah, Taufik. 1979. *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES

- 'Abdurrahim, Muhammad 'Imaduddin. 2002. *Islam Sistem Nilai Terpadu*. Jakarta: Gema Insani
- Abu Saud, Mahmud. 1984. *Khutut Raisiyyah fi al-Iqtishad al-Islamiyyah*. Kuwait: Sahaba Islamic Press
- Afzalurrahman. 1997. *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, ter. Dewi Nurjulianti, dkk. Jakarta: Penerbit Yayasan Swarna Bhumi
- Ahmad, Mustaq. 1995. *Business Ethics in Islam*. Pakistan: The International Institute of Islamic Thought
- Alma, H. Buchari. 2002. *Kewirausahaan*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Al-Qur'an al-Karim
- Antonio, Muhammad Syafii. 2007. *Muhammad SAW The Super Leader Super Manager*. Jakarta: Prophetic Leadership & Management Centre.
- Chapra, Umer. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, ter. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Institute
- Djakfar, Muhammad. 2009. *Anatomi Perilaku Bisnis Dialektika Etika dengan Realitas*. Malang: UIN Malang Press.
- Djakfar, Muhammad. 2012. *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Depok: Penebar Plus.
- Djakfar, Muhammad. 2014. *Agama, Etika, dan Ekonomi Menyingkap Akar Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Menangkap Esensi, Menawarkan Solusi*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Djakfar, Muhammad. 2015. *Wacana Teologi Ekonomi Membumikan Titah Langit di Ranah Bisnis dalam Era Globalisasi*. Revised Edifition. Malang: UIN Maliki Press.
- Hasan, Sudirman. 2009. *Spirit Sufism and the of Capitalism*. Malang: UIN- Malang Press.
- 'Iwd, Ahmad Shafiyuddin. 1401H. *Ushul Ilm al'Iqtishad al Islamiy*. Riyad: Kulliyah al-Syariah
- Kahf, Monzer. 1979. *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*. Plainted, Ind,: Muslim Student Association of U.S and Canada

- Karim, Adiwarman A. 2002. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia
- Kertajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula. 2006. *Syariah Marketing*. Bandung: Mizan
- Madjid, Nurcholish. 2000. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1995. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, ter. M. Nastangin. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Muthahhari, Murtadha. 1992. *Islam Agama Keadilan*, ter. Agus Effendi. Jakarta: Pustaka Hidayah
- Naqvi, Syed Nawab Haidar. 1994. *Islam, Economics, and Society*. London and New York: Kegan Paul International
- Nasution, Muhammad Yasir. 1996. *Manusia Menurut Al-Ghazali*. Jakarta: Srigunting
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islamiy*. Kairo-Mesir: Maktabah Wahbah
- Siddiqi, Muhammad Najatullah. 1979. *The Economic Enterprise in Islam*. Lahore: Islamic Publications Ltd
- Syaikhun, Muhammad. 2012. *Al-Fikr al-Iqtishadiy lil Harakah al-Islamiyyah al-Mu'asarah*, Malang: Matba'ah al-Jamiah
- Sya'rawi, M. Mutawalli. 1991. *Islam di Antara Kapitalisme dan Komunisme*, ter. H. Salim Basyarahil. Jakarta: Gema Insani Press
- Weber, Max, 2001. *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*. London and New York: Roudledge.
- Zohar, Danah & Ian Marshall. 2005. *SC Spiritual Capital Memberdayakan SQ di Dunia Bisnis*, ter. Helmi Mustofa. Bandung: Mizan